

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kemiskinan

1. Definisi kemiskinan

Kemiskinan adalah tidak sanggupnya individu dalam mencukupi kebutuhan standarisasi hidup minimal (Kuncoro, 2006). Kemiskinan dapat muncul ketika anggota masyarakat tidak mampu atau tidak mau ikut andil dalam proses transformasi karena kurangnya elemen produksi atau kualitas yang buruk (Arsyad, 2010). Dengan demikian, Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal mengenai kualitas hidup.

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami “*capability deprivation*” dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan (Wijayanto, 2014:73).

Kemiskinan jika dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda sehingga bisa dikatakan sebagai masalah yang bersifat multidimensi. Seperti yang dikemukakan oleh (Subandi, 2016, p. 221), yang mengatakan bahwa kemiskinan yaitu suatu *integrated concept* yang memiliki lima aspek, antara lain adalah: (1) ketergantungan (*dependence*); (2) kemiskinan (*proper*); (3) keterasingan (*isolation*); baik secara geografis maupun sosiologis, (4) ketidakberdayaan (*powerless*); dan (5) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*). Sedangkan bila dilihat dari kebijakan umum kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer meliputi miskin akan aset, organisasi sosial, pengetahuan serta keterampilan. Sementara aspek sekunder meliputi miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Konstruksi kemiskinan tersebut terwujud dalam bentuk kekurangan gizi, air bersih, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kemiskinan (*poverty*) ialah permasalahan yang menimpa semua negara, terkhusus negara yang berkembang salah satu contohnya adalah Indonesia. Penyebabnya kemiskinan sifatnya multidimensi, yang berarti memiliki banyak komponen inti seperti kurangnya aset, organisasi sosial-politik, keterampilan, pengetahuan, serta aspek sekunder seperti kurangnya informasi, jaringan sosial, dan sumber keuangan. Dimensi kemiskinan ini diwujudkan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, tingkat pendidikan yang rendah, dan pelayanan kesehatan yang buruk. Selain itu, berbagai elemen kemiskinan terkait hubungan langsung maupun tidak langsung. Dapat dinyatakan jika mundur atau majunya di bidang tertentu maka akibatnya pada maju atau mundurnya bidang lain. Pada sisi lainnya kemiskinan merupakan tingkat ketidakmampuan seseorang dalam mencari harta baik individu maupun kolektif (Simatupang & Dermoredjo, 2003).

2. Jenis kemiskinan

Jenis kemiskinan menurut Nurkse dalam (Kuncoro, 2006, p. 113) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Kemiskinan Absolut

Seseorang dianggap masuk kemiskinan absolut jika pendapatannya dibawah garis kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Berupa kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikannya.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2) Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep

ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini berkaitan dengan seseorang yang tidak mau atau enggan melakukan usaha guna memperbaiki kehidupannya. Walaupun ada pihak yang mendukungnya.

Sementara *Cronic Poverty Research Center* (CPRC) atau pusat penelitian kemiskinan kronis mengelompokkan orang miskin menjadi lima jenis yaitu :

- 1) Selalu miskin (secara konsisten tetap di bawah garis kemiskinan).
- 2) Biasanya miskin (sebagian besar tetap di bawah garis kemiskinan).
- 3) Kemiskinan yang berfluktuasi (sering naik turun garis kemiskinan).
- 4) Kadang-kadang miskin (kebanyakan tetap di atas garis kemiskinan dengan kadang-kadang berada di bawah garis kemiskinan)
- 5) Tidak pernah miskin (tetap selalu di atas garis kemiskinan)

Selain itu, bila dilihat dari pola waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi *persistent poverty*, *cyclical poverty*, *seasonal poverty*, dan *accidental poverty*. Pola pertama, *persistent poverty* adalah kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah yang penduduknya tergolong miskin umumnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber daya alamnya, atau daerahnya terisolasi, sehingga tidak memiliki akses jalan dan transportasi dengan daerah lainnya. Pola kedua, yakni *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga, *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering ditemukan pada masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan dan buruh pada pertanian tanaman pangan. Pola keempat, *accidental poverty*, yakni kemiskinan dikarenakan adanya bencana alam atau

dampak dari adanya suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Nurwati, 2008).

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

Setiap permasalahan yang timbul pasti karena ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan.

Dalam sejumlah literatur beberapa ahli menjelaskan adanya faktor-faktor penyebab kemiskinan seperti:

- a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.
- b. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
- c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan tersebut.
- d. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya (Kartasmita Ginanjar, 1999)

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hidayat (2017), *Pertama*, Secara makro, kemiskinan timbul karena tidak samanya pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya mempunyai sumber daya dengan jumlah terbatas dan berkualitas rendah. *Kedua*, Kemiskinan muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia yang rendah, di mana artinya produktivitasnya kecil, dan penghasilan juga kecil. *Ketiga*, Kemiskinan ada disebabkan adanya gap akses dan modal. Akibat terbatasnya dan ketiadaannya (bahkan tidak ada) akses manusia

untuk memiliki pilihan dalam upaya pengembangan hidupnya, terkecuali apabila telah menjalankan yang terpaksa dilakukan dan bukan apa yang harusnya dia lakukan. Alasan itulah manusia mempunyai keterbatasan guna melakukan pilihannya. Pada kemudian hari berdampak pada potensi yang terhambat. Kemiskinan ini juga timbul akibat dari perbandingan sumber daya manusia. Kualitas yang rendah juga berakibat pada hasil yang rendah pula. Di masa sekarang kemiskinan berdasarkan berapa besar seseorang memiliki uang banyak. Apabila mempunyai uang yang banyak maka akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dikarenakan mereka mampu bersekolah yang tinggi dan mendapat fasilitas yang lebih baik. Berbeda dengan orang yang miskin untuk pendidikan saja mereka tidak mampu dikarenakan tidak memiliki cukup uang untuk pendidikan lebih tinggi lagi.

Sementara (Nazara, 2007) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Pendidikan: Pendidikan yang rendah sering kali berhubungan langsung dengan kemiskinan. Kurangnya akses ke pendidikan yang berkualitas mengurangi peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan baik.
- b) Kesempatan Kerja: Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas atau pekerjaan dengan upah rendah dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Banyak orang miskin bekerja di sektor informal yang tidak memberikan jaminan kerja atau perlindungan sosial.
- c) Akses terhadap Sumber Daya dan Layanan: Kurangnya akses terhadap sumber daya seperti air bersih, listrik, dan layanan dasar lainnya dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Infrastruktur yang buruk juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
- d) Lingkungan dan Geografi: Lokasi geografis dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Daerah yang terpencil atau rentan terhadap bencana alam seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Factor-faktor yang diuraikan di atas memiliki keterkaitan yang saling berhubungan. Rumah tangga miskin biasanya berpendidikan rendah dan berada di daerah pedesaan. Akibatnya, produktivitas mereka rendah, yang berarti penghasilan mereka tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakaian, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Oleh karena itu, rumah tangga yang berada di garis kemiskinan akan menghasilkan keluarga-keluarga yang miskin juga pada generasi berikutnya.

4. Indikator Kemiskinan

Secara umum, teori yang digunakan yang digunakan dalam mengukur berbagai macam indikator kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua metode pendekatan, yaitu *Head Count Index* (HCI-P0) dan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dalam konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin dipandang sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Adapun *Head Count Index* menghitung persentase yang berada di bawah garis kemiskinan. *Head Count Index* termasuk dalam perhitungan kemiskinan yang cukup sering digunakan di Indonesia (BPS, 2022)

Konsep garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dikategorikan menjadi tiga:

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur

dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. (BPS, 2022)

Head Count Index (HCI-P0) merupakan cara menghitung persentase yang berada di bawah garis kemiskinan. Perhitungan tersebut akan memperlihatkan jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan, yaitu penduduk yang berada di bawah batas pengeluaran tertentu, dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^\alpha$$

Dimana:

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Ada beberapa indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai berikut:

- 1) Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan.
- 2) Tidak memiliki biaya untuk mencukupi kebutuhan pokok lainnya seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, sanitasi, dan air bersih.
- 3) Tidak memiliki jaminan untuk kehidupan di masa depan, disebabkan tidak memiliki investasi untuk pendidikan dan keluarga.
- 4) Tingkat kualitas sumber daya manusia begitu rendah dan sumber daya alam yang tersedia juga terbatas sehingga mengakibatkan kebutuhan untuk sehari-hari menjadi tidak terpenuhi.

- 5) Kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan kurang membangun dan berpartisipasi
- 6) Sulitnya mendapat akses untuk mencari suatu pekerjaan dengan penghasilan tetap
- 7) Faktor-faktor seperti modal dan cacat fisik maupun mental menjadi sebuah indikator kemiskinan sehingga seseorang menjadi tidak mempunyai keinginan berusaha.
- 8) Ketidakmampuan sosial dan ketidaktergantungan seperti tidak sekolah, tidak mempunyai tempat tinggal, kelompok terpendek, menjadi korban kekerasan rumah tangga, wanita menjadi tulang punggung keluarga dan lainnya.

5. Kemiskinan Menurut Perspektif Islam

Islam melalui kitab suci Al-Quran menggunakan beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu *faqir*, *miskiin*, *al-sa'iil*, dan *al-mahruum*. Tetapi kata fakir dan miskin serta berbagai bentuk lain dari keduanya paling banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Menurut (Ridwan, 2011, p. 31) kata *faqir* dan *miskiin* yang disebut dalam Al Quran berjumlah 36 ayat, kata *faqir* dijumpai sebanyak 12 kali dan kata *miskiin* disebut sebanyak 25 kali.

Kemudian Güner (2005) membedakan kemiskinan dalam Al Quran menjadi dua yaitu kemiskinan spiritual dan kemiskinan material. Kemiskinan spiritual sebagaimana pada surat Fatir 35:15, Muhammad 47:38, dan Al-Hashr 59:8 yang menunjukkan kebutuhan manusia yang fakir akan karunia dari Allah. Sedangkan pada selain ayat-ayat tersebut Al Quran lebih banyak menunjukkan kemiskinan material. Sejalan dengan hal tersebut, Peerzade (1997:87) juga menyatakan bahwa kemiskinan dalam Islam terkait dengan aspek metafisik yakni rasa membutuhkan terhadap ampunan dari Allah. (Ridwan, 2011, p. 30) menambahkan juga bahwa kemiskinan dalam Islam mencakup ranah mental/psikis sebagaimana keadaan miskin yang kebanyakan malah membuat orang-orang miskin menikmati bantuan dari orang lain, bukan malah membuat mereka bangkit dan berubah untuk menjadi orang yang membantu daripada yang dibantu. Jadi, dapat dipahami di

sini bahwa makna kemiskinan dalam Islam adalah suatu keadaan di mana manusia yang sangat butuh karunia dari Allah SWT tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT.

Berbagai sarjana muslim menjabarkan konsep fungsi kesejahteraan sosial islam sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep masalah, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat. Al Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer (Karim, 2004, p. 282).

Menurut Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni, agama (al-din), hidup (nafs), keturunan (nasl), harta (mal), dan akal (aql). Selain itu, Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite, yakni kebutuhan (daruri), kesenangan (hajat), dan kemewahan (tahsinaat) (Karim, 2004, p. 283).

Al-Ghazali juga membagi kemiskinan menjadi dua bagian, yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan materi dan kemiskinan yang berkaitan dengan kebutuhan spiritual. Menurut Ahmed, kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan barang dan jasa, namun juga kemiskinan spiritual. Rehman meyakini bahwa peningkatan kehidupan spiritual umat Islam dapat dicapai melalui peningkatan kehidupan material. Selain itu, Chapra mengatakan Islam adalah agama seimbang yang menempatkan kepentingan spiritual dan duniawi sama pentingnya (Sifa', 2019).

Masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang wajib untuk diperhatikan dalam agama Islam. Bahkan Ali bin Abi Thalib berkata, "Seandainya kemiskinan berwujud manusia, niscaya aku akan membunuhnya", kalimat tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan sangatlah penting, karena apabila kemiskinan terjadi di mana-mana maka akan terjadi banyak kerusakan, kehancuran,

dan kejahatan akan semakin merajalela akibat dari penderitaan terhadap rasa kekurangan (Ulya, 2018).

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural. Pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (QS 30:41) sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya (QS 42:30). Kedua, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (QS 3: 180, QS 70:18) sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil (QS 9:34), memakan harta anak yatim (QS 4: 2, 6,), dan memakan harta riba (QS 2:275). Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah Fir'aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa (QS 28:1-88). Kelima, kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Bencana alam yang memiskinkan ini seperti yang menimpa kaum Saba (QS 34: 14-15) atau peperangan yang menciptakan para pengungsi miskin yang terusir dari negerinya (QS 59:8-9)

Islam memerintahkan kepada umatnya secara tegas untuk melaksanakan zakat, infaq, perintah untuk melaksanakan haji, membiayai peperangan sendiri dan lain sebagainya. Segala perintah dalam Islam tersebut dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan dan memiliki harta (Cahya, 2015), sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ

لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.”

Berdasarkan ayat di atas dapat ditarik benang merahnya, bahwa Islam mendorong umatnya untuk memiliki harta kekayaan dalam menghadapi musuh Islam. Setiap orang berkewajiban untuk melawan segala bentuk kemiskinan yang dialaminya karena kemiskinan merupakan musuh besar umat Islam. Tidak ada satupun perintah untuk menjadi orang miskin yang Allah berikan kepada umatnya. Selain itu, pembahasan yang memiliki keterkaitan dengan kemiskinan juga terdapat dalam QS. Al-Maun ayat 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّبْنِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

Artinya “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim 3. dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin.”

Berdasarkan ayat di atas, Islam memberikan jalan keluar untuk menghadapi kemiskinan. Hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim ialah diwajibkan untuk berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan. Seperti perintah Allah untuk menyantuni mereka yang miskin atau serba kekurangan. Orang yang tidak peduli terhadap sesamanya dengan membiarkannya kelaparan dianggap sama saja seperti orang yang mendustakan agama.

B. *Islamic Human Development Index (I-HDI)*

1. *Definisi Islamic Human Development Index (I-HDI)*

Islamic-Human Development Index (I-HDI) adalah konsep baru yang konsep dasarnya tetap berawal dari *Human Development Index (HDI)* kemudian dikembangkan dengan konsep maqashid syariah. Pencapaian angka HDI dan I-

HDI menjadi barometer seberapa kuat kualitas syariah dalam agenda pembangunan ekonomi berbasis maqashid syariah yang erat kaitannya dengan nilai kemaslahatan dan keadilan (Rochmawati, 2018).

Penelitian yang dilakukan (Anto, 2011) yang berjudul *Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries* memperkenalkan konsep Indeks Pembangunan Manusia Islam. Dalam penelitian tersebut, juga dirumuskan *Islamic Human Development Index* dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah* Al-Ghazali yang meliputi lima elemen kebutuhan dasar manusia (*Daruriyyat*). Namun, dalam merumuskan pengukuran tersebut ia menambahkan elemen kebebasan dan lingkungan sebagai Indikator pembangunan manusia, padahal Al-Ghazali sendiri diketahui hanya membagi ke dalam lima (5) elemen dasar, dimana *Dīn* (Agama) yang berkaitan dengan Akhirat, dan keempat elemen yang lainnya berkaitan dengan *Duniawi* (Dunia)

Islamic-Human Development Index (I-HDI) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat (mencapai falah) (P3EI, 2014), (Septiarini, M. M. & Herianingrum, 2017).

Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) merupakan sebuah alat untuk mengukur apakah pembangunan manusia itu sudah berkualitas atau belum, yang diukur dalam perspektif Islam. Tujuan dari pengukuran *Islamic-Human Development Index* (I-HDI) adalah bahwa supaya manusia dapat hidup sejahtera untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Alat ukur Islamic Human Development Index (I-HDI)

Tujuan dari pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam yaitu berdasarkan pada *maslahah*. Sehubungan dengan masalah dasar manusia yang dijelaskan di atas, maka dibentuk suatu indeks yang mewakili dari masing-

masing dimensi untuk mengukur kelima dimensi tersebut. Indikator pengukuran *Islamic Human Development Index* adalah dengan 5 dimensi, antara lain ad-dien, an-nafs, al-aql, an-nasl, dan al-maal. Dalam penelitian (Rochmawati, 2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa uraian terkait alat ukur *Islamic Human Development Index*, sebagai berikut:

1) *Hifdzu ad-Dien* (Memelihara Agama)

Agama merupakan suatu kebutuhan manusia yang paling penting. Dalam islam, agama bukan hanya tentang ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan serta untuk membangun moralitas manusia. Agama adalah diperlukan oleh manusia kapan dan dimanapun manusia itu berada, berdasarkan tingkatnya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a. Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk dalam tingkat primer, seperti adanya penutup aurat dalam melaksanakan shalat, adanya pendidikan tata cara sholat, jika hal ini tidak ada, maka akan mengancam eksistensi agama.
- b. Memelihara dalam peringkat *hajiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, misalnya adanya penutup aurat yang layak dalam melaksanakan ibadah shalat, seandainya tidak ada pakaian yang layak maka shalatnya akan tetap sah.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Allah SWT. Misalnya adanya tempat shalat yang bagus, sehingga membuat mushalli betah untuk beribadah lama dalam mushalla tersebut. Kegiatan ini erat kaitanya dengan etika yang baik. Jika hal ini tidak dilakukan karena tidak memungkinkan maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan mempersulit orang yang bersangkutan (Rafjansani, 2012).

- d. Memelihara agama dalam peringkat *al-wujud*, yaitu memelihara dan menjaga ibadah shalat dan zakat. Hal ini harus dijaga adalah sebagai cara mencegah hal-hal yang menyebabkan eksistensi agama menjadi terancam (Kasdi, 2014).

2) *Hifdzu an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Dalam hal ini, jiwa yang dimaksud adalah kebutuhan utama seseorang dalam rangka untuk menjalankan keberlangsungan hidup seperti pemenuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja dan pelayanan sosial (Jajuli, 2016), berdasarkan tingkat kepentingannya juga dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup dan obat-obatan untuk menghilangkan penyakit. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia, atau apabila obat-obatan ini tidak ada maka juga sama.
- b. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyah*, seperti dibolehkan menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyah* seperti tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan atau etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang. (Rafjansani, 2014)

3) *Hifdzu al-'Aql* (Memelihara Akal)

Akal adalah merupakan tempat sumber ilmu. Jika akal akan dimanfaatkan dengan baik, hal ini akan membuat jiwa seseorang itu menjadi lebih berharga. Oleh karena itu, perlindungan akal ditempatkan setelah perlindungan jiwa (Jajuli, 2016). Dilihat dari segi kepentingan dalam

menjaga akal, hal tersebut dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, antara lain:

- a. Memelihara akal dalam peringkat dharuriyyah adalah memelihara akal di tingkat dasar seperti diharamkan mengkonsumsi narkoba atau hal-hal yang menyebabkan pikiran hilang. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal/hilang pikiran.
- b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyyah seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Apabila kegiatan ini tidak dilakukan, maka tidak akan merusak akal seseorang tetapi hanya akan mempersulit diri orang tersebut dalam hal ilmu pengetahuan, tetapi kalau pendidikan itu skala besar maka tingkatannya bukan hajiyyah lagi melainkan dharuriyyah.
- c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyah erat kaitannya dengan etika dan jika tidak dilakukan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. Misalnya menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, pemberian beasiswa untuk studi di strata yang tinggi. (Rafjansani, 2014)

4) *Hifdzu an-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Dalam hal ini, perlindungan keturunan di sini meliputi lembaga perkawinan, pelayanan bagi anak, memelihara anak yatim dan sebagainya (Jajuli, 2016). Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyah seperti anjuran untuk menikah. Jadi dapat dikatakan upaya untuk menjaga eksistensi keturunan adalah dengan menikah, dengan membantu kegiatan melahirkan agar bayi yang lahir dalam keadaan selamat dan yang lain.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyah seperti memberikan suplement-suplement tambahan yang dibutuhkan bayi, supaya bayi menjadi tumbuh sehat.

- c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyah seperti menyediakan tempat yang kondusif, enak dan tenang bagi ibu yang mau melahirkan, sehingga para ibu senang untuk melahirkan dan merawat bayinya di sana. (Rafjansani, 2014)

5) *Hifdzu al-Maal* (Memelihara Harta)

Perlindungan kekayaan meliputi pemeliharaan keuangan, regulasi, pekerjaan, transaksi bisnis, kesadaran tentang pentingnya halal haram dan penegak hukum yang berkaitan dengan harta (Jajuli, 2016), dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, antara lain:

- a. Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyah seperti larangan mengambil harta orang lain yang bukan merupakan hak kita dengan cara yang tidak benar.
- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyah adalah memenuhi kebutuhan tingkat kedua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti menginvestasikan hartanya atau mengajak orang bekerjasama dalam bisnis.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyah* erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau berbisnis. Misalnya mengikuti pendidikan muamalah / berbisnis modern. (Rafjansani, 2014)

Telah didefinisikan sebagai angka I-HDI di Provinsi Sumatera Utara dengan jenis data tahunan dan dinyatakan dalam satuan persen. Yang diperoleh dari hasil perhitungan indeks dengan data – data sebagai berikut:

- a. Dimensi Ad-Dien, di mana dimensi ini akan mengukur selisih nilai aktual kriminalitas dengan nilai aktual kriminalitas terendah dibandingkan dengan selisih nilai aktual kriminalitas tertinggi dengan nilai aktual kriminalitas terendah.
- b. Dimensi An-Nafs, di mana dimensi ini akan mengukur selisih nilai aktual harapan hidup dengan nilai aktual harapan hidup terendah

dibandingkan dengan selisih dari nilai aktual hidup tertinggi dan nilai aktual hidup terendah.

- c. Dimensi Al-Aql, yang mana akan menjumlahkan antara ½ dari angka melek huruf dengan 1/3 rata – rata lama sekolah.
- d. Dimensi An-Nasl, dimensi ini akan mengukurnya dengan menghitung 50% dari jumlah kelahiran total dan kematian bayi.
- e. Dimensi Al-Maal, yang mana dimensi ini akan mengukurnya dengan menghitung 50% dari jumlah *Distributional Equity Index* (DEI) dan pengeluaran perkapita indeks. (Rafjansani, 2014)

3. Perhitungan Islamic Human Development Index

Rafjansani (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa perhitungan dan indeks yang dapat digunakan untuk mencari nilai I- HDI. Diketahui bahwa didefinisikan sebagai angka I-HDI di Provinsi Sumatera Utara dengan jenis data tahunan dan dinyatakan dalam satuan persen. Yang diperoleh dari hasil perhitungan indeks dengan data – data sebagai berikut:

- a. Dimensi ad-dien, secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

$$ID = \frac{\text{nilai aktual kriminalitas} - \text{nilai aktual kriminalitas terendah}}{\text{nilai aktual kriminalitas tertinggi} - \text{nilai aktual kriminalitas terendah}}$$

- b. Dimensi An-Nafs, secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

$$INF = \frac{\text{nilai aktual harapan hidup} - \text{nilai aktual harapan hidup terendah}}{\text{nilai aktual harapan hidup tertinggi} - \text{nilai aktual harapan hidup terendah}}$$

- c. Dimensi Al-Aql, secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

$$LI = \frac{\text{nilai aktual melek huruf} - \text{nilai aktual melek huruf terendah}}{\text{nilai aktual melek huruf tertinggi} - \text{nilai aktual melek huruf terendah}}$$

$$MYSI = \frac{\text{nilai aktual lama sekolah} - \text{nilai aktual lama sekolah terendah}}{\text{nilai aktual lama sekolah tertinggi} - \text{nilai aktual lama sekolah terendah}}$$

$$IA = \frac{1}{2} (LI) + \frac{1}{3} (MYSI)$$

Dimana :

IA : Index al – Aql (Memelihara Akal)

LI : *Literacy Index* (angka melek huruf)

MYSI : *Mean Years School Index* (rata-rata lama sekolah)

d. Dimensi An-Nasl, secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

$$IAK = \frac{\text{nilai aktual angka kelahiran} - \text{nilai aktual angka kelahiran terendah}}{\text{nilai aktual angka kelahiran tertinggi} - \text{nilai aktual angka kelahiran terendah}}$$

$$IAKB = \frac{\text{nilai aktual angka kematian bayi} - \text{nilai aktual angka kematian bayi terendah}}{\text{nilai aktual angka kematian bayi tertinggi} - \text{nilai aktual angka kematian bayi terendah}}$$

$$INS = \frac{1}{2} (IAK - IAKB)$$

Keterangan :

IAK : Index Angka Kelahiran

IAKB : Index Angka Kematian Bayi

INS : Index Nasl

e. Dimensi Al-Maal, Sebelum mencari *Index Al-Maal* maka sebelumnya angka gini Rasio dan kedalaman kemiskinan perlu dinormalkan dengan rumus:

Normalisasi Gini : $NGc = 1 - Gc$

Normalisasi Kedalaman kemiskinan : $nPi = 100 - Pi$

Rumus Index Gini :

$$\text{Index Gini (Gci)} = \frac{\text{nilai aktual } NGc - \text{nilai aktual } NGc \text{ terendah}}{\text{nilai aktual angka } NGc \text{ tertinggi} - \text{nilai aktual } NGc \text{ terendah}}$$

Rumus index kedalaman kemiskinan (Pi)

$$\text{Poverty Index (Pi)} = \frac{\text{nilai aktual } nPi - \text{nilai aktual } nPi \text{ terendah}}{\text{nilai aktual } nPi \text{ tertinggi} - \text{nilai aktual } nPi \text{ terendah}}$$

Setelah kedua index ini diperoleh maka dia akan disebut dengan *Distribution Equity Index (DEI)*

$$DEI = 1/2 (Gci + Pi)$$

Selanjutnya data pengeluaran perkapita disesuaikan menjadi index dengan rumus :

$$\text{Pengeluaran Perkapita Index} = \frac{\text{nilai aktual } PP - \text{nilai aktual } PP \text{ terendah}}{\text{nilai aktual } PP \text{ tertinggi} - \text{nilai aktual } PP \text{ terendah}}$$

Dengan dihitungnya *Distribution Equity Index* (DEI) dan pengeluaran perkapita index (PPi) maka akan dapat dihitung *Index Al Maal* dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Index Al Maal (IM) = } 1/2 \text{ (DEI + PPi)}$$

Dimana :

IM = *Index al Maal*

DEI = *Distribution Equity Index*

PPi = *Pengeluaran Perkapita*

nGc = *Normalized Gini Coefficient*

Gc = *Gini Coefficient*

Gci = *Gini Coefisient Index*

nPi = *Normalized Poverty Index*

Pi = *Poverty Index*

Dengan diketahuinya rumus pembentuk IHDI, maka dapatlah ditarik rumus *Islamic Human Development Index*:

$$\text{I-HDI} = (2/5 \text{ (ID)} + 1/5 \text{ (INF + IA + INS + IM)}) \times 100$$

Untuk menghitung indeks dari masing- masing komponen I-HDI, digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Maksimum dan Minimum komponen I-HDI

<i>Hifdzu</i>	Komponen IHDI	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
Agama	Angka Kriminalitas	Aktual Maksimum	Aktual Minimum	-
Jiwa	Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Akal	Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP

	Rata-rata lama sekolah	15	0	Standar UNDP
Keturunan	Angka Kelahiran	Aktual Maksimum	Aktual Minimum	-
	Total Angka Kematian Bayi	Aktual Maksimum	Aktual Minimum	-
Harta	Pengeluaran Per Kapita Riil	732.720	360.000	Standar Nasional
	Indeks Gini	Aktual Maksimum	Aktual Minimum	
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Aktual Maksimum	Aktual Minimum	-

Sumber: BPS & UNDP, disesuaikan.

Dari tabel di atas disajikan beberapa komponen maksimal dan minimum I-HDI, beberapa telah sesuai dengan standar, baik standar internasional maupun standar nasional. yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Beberapa komponen yang menggunakan standar nasional perhitungan BPS yaitu pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

C. Penyerapan Tenaga Kerja

1. Pengertian Penyerapan Tenaga Kerja

Ditinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 setiap orang yang dapat bekerja untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri ataupun masyarakat dianggap sebagai tenaga kerja. Sedangkan Banyaknya lapangan pekerjaan yang telah terisi yang diukur dengan pertambahan penduduk yang bekerja, dikenal sebagai penyerapan ketenaga kerjaan. Tenaga kerja diserap dan didistribusikan ke beberapa sektor ekonomi. Kebutuhan akan tenaga kerja menyebabkan penyerapan penduduk yang bekerja di berbagai lapangan usaha dari berbagai sektor. Akibatnya, penyerapan ketenaga kerjaan mampu didefinisikan atas permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2006).

Terserapnya tenaga kerja erat kaitannya dengan terbukanya lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja ialah keadaan di mana total ketersediaannya lapangan

kerja untuk para pencari pekerjaan, serta jumlah maksimum pekerja yang dapat ditampung oleh unit perusahaan atau lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja sering digambarkan sebagai jumlah pekerja yang dapat atau akan secara aktif berkontribusi pada perekonomian. Jika jumlah perusahaan atau peluang kerja yang ada mencukupi atau sudah seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang ada, maka semua tenaga kerja akan dapat mendapatkan pekerjaan (Manalu & S, 2021). Penawaran tenaga kerja mengacu pada jumlah orang yang bersedia bekerja dalam proses produksi. Pencari kerja adalah mereka yang siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja mengacu pada jumlah orang yang bekerja atau mencari pekerjaan. Jumlah individu yang dipekerjakan ditentukan oleh besarnya permintaan masyarakat. Aktivitas ekonomi dan tingkat upah berdampak pada permintaan (Simanjuntak, 2008).

Nurkse juga menyampaikan masalah rendahnya investasi menyebabkan akumulasi modal yang rendah sehingga proses tersedianya lapangan pekerjaan menjadi rendah dan rendahnya lapangan pekerjaan akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja dalam lapangan kerja menjadi sedikit atau banyak masyarakat yang menganggur sehingga kemiskinan menjadi meningkat. Penyerapan tenaga kerja disini yaitu sebuah situasi yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Tenaga kerja yang terserap adalah terisinya jumlah lapangan kerja, yang tercermin dari tingginya pertumbuhan penduduk yang bekerja. Penyerapan penduduk yang bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Todaro, 2004).

Berdasarkan definisi di atas, tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan usia minimal 15 tahun.

2. Klasifikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi tenaga kerja yaitu pengelompokan ketenagakerjaan yang sudah disusun dengan didasarkan pada kriteria yang sudah ditentukan, menurut (Dwiyanto, 2021) yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan penduduknya
 - a. Tenaga kerja merupakan keseluruhan total penduduk dianggap mampu dan sanggup bekerja apabila tidak ada permintaan kerja. Menurut UU Tenaga Kerja, masyarakat yang digolongkan sebagai tenaga kerja ialah yang sudah berumur antara 15 tahun hingga 64 tahun.
 - b. Tidak masuk tenaga kerja, yaitu penduduk dengan kriteria tidak mau bekerja atau tidak sanggup bekerja meskipun ada tawaran pekerjaan. Menurut UU Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, bukan tenaga kerja adalah seseorang yang berada pada masa luar kerja yakni dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun.
- 2) Kategori batas kerja
 - a. Angkatan kerja, yaitu seseorang yang berada pada umur produktif yakni 15-64 tahun dan memiliki pekerjaan tetapi tidak bekerja ataupun aktif mencari pekerjaan.
 - b. Bukan angkatan kerja, adalah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas dengan kegiatan bersekolah atau menanggulangi rumah tangga dan sebagainya.
- 3) Kategori Kualitasnya
 - a. Tenaga kerja terdidik, adalah tenaga kerja yang menguasai bidang tertentu berdasarkan cara pelatihan, sekolah dan lainnya berupa: guru, notaris, dokter, dan lainnya.
 - b. Tenaga kerja terlatih, merupakan tenaga kerja yang mampu dan menguasai pada keahlian bidang tertentu dari pengalaman kerja atau pelatihan secara terus menerus dan berulang-ulang berupa mekanik, ahli bedah, apoteker, ahli pembedah, serta lainnya.
 - c. Tenaga kerja di luar pendidikan dan pelatihan, yaitu tenaga kerja kasar dan berfokus kekuatan saja. Contoh: pembantu rumah tangga, buruh angkut, kuli, serta lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan dengan jelas bahwa tenaga kerja meliputi lingkup yang sangat luas dan berbagai macam aspek. pekerja yang bekerja untuk perusahaan swasta atau instansi pemerintah, dan pekerja negeri atau

pemerintah. Undang-undang perburuhan biasanya mengatur pekerja di sektor swasta (kekuasaan), sementara pekerja di sektor publik (kekuasaan) dilindungi atau diatur oleh undang-undang perburuhan. Seorang pekerja juga dapat didefinisikan sebagai dirinya sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima kompensasi tetapi bersedia atau memiliki kemampuan untuk bekerja untuk mendapatkan kompensasi.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja alam kelompok yang sama. Yang dimaksud penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah berusia 15-64 tahun yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Perhitungan TPAK memiliki Formulasi yaitu rasio perbandingan antara angkatan kerja bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 (usia kerja). berikut adalah formulasinya (Dwiyanto, 2021):

$$TPAK = \frac{\text{Angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

Dimana :

X = Angkatan kerja (baik yang bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan.)

Y = Jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Data TPAK digunakan untuk mengetahui profesi kerja yang benar-benar terlibat dalam proses produksi. Ketika seseorang memiliki kesempatan kerja, mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan perannya sebagai sumber ekonomi dalam proses produksi, sehingga mereka dapat hidup lebih baik. Karena kesempatan kerja dan TPAK berbanding lurus, tingkat kesempatan kerja tinggi juga akan meningkatkan TPAK.

Sempitnya penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu akar permasalahan kemiskinan (Arsyad, 2010). Ketika ada kesempatan kerja, orang miskin dapat

menjadi lebih produktif, yang berarti mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka (Islam, 2014). Oleh karena itu, semakin banyak angkatan kerja yang terserap di lapangan, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang berarti semakin besar kemungkinan mereka untuk keluar dari kemiskinan.

4. Indikator Penyerapan Tenaga Kerja

Adapun indikator dari penyerapan tenaga kerja menurut (Dwiyanto, 2021) adalah sebagai berikut

a. Kesempatan Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional di dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dijelaskan 4 (empat) tujuan utama, pertama pendayagunaan seluruh angkatan kerja nasional dalam proses pembangunan nasional atau perekonomian; kedua pemerataan kesempatan kerja di seluruh Indonesia; ketiga perlindungan tenaga kerja di seluruh Indonesia; dan keempat kesejahteraan seluruh pekerja beserta keluarganya.

Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) mencakup 9 indikator utama yang merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan. 9 (sembilan) indikator utama dalam pengukuran IPK dirinci menjadi sub-indikator yang dapat mewakili dan menggambarkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan pada setiap indikator utama. Salah satu indikator dalam pengukuran pembangunan ketenagakerjaan adalah kesempatan kerja.

b. Perubahan Upah Minimum

Upah minimum yang berubah-ubah setiap tahunnya dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, karena apabila tingkat upah naik maka perusahaan berhak untuk menaikkan upah kepada pekerja yang sudah ada dan tidak menambah jumlah tenaga kerja.

Menurut (Handoko, 2015) tentang teori tentang penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB), tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan secara internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, kepuasan kerja dan modal.

5. Proses Penyerapan Tenaga Kerja

Proses penyerapan tenaga kerja ini tidak hanya bagaimana memahami dan menganalisis secara mendalam kebutuhan atau problematika dalam perusahaan atau suatu usaha saja, melainkan harus mampu beradaptasi dan mempertimbangkan secara matang tantangan eksternal dan internal.

Adapun tantangan eksternal yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja secara umum terbagi menjadi sektor teknologi, sektor ekonomi, sektor sosio-kultural, sektor politik dan sektor internasional. Sedangkan tantangan internal mencakup pada faktor rencana strategik, anggaran, estimasi produksi, usaha atau aktivitas baru, rancangan bangun organisasi dan tugas pekerjaan (Thamrin, 2019a).

Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor, namun tiap sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda demikian juga tiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal, yaitu :

- a. Terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja masing-masing sektor
- b. Secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

6. Tenaga Kerja dalam Perspektif Islam

Pekerjaan merupakan kegiatan terpenting dalam kehidupan manusia dan merupakan kegiatan yang dominan dibandingkan dengan kegiatan lainnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karya tersebut dapat diartikan secara umum maupun khusus. Secara umum, pekerjaan mencakup segala macam usaha yang dilakukan seseorang, baik materiil maupun immateriil, jasmani maupun

intelektual, serta permasalahan duniawi atau permasalahan yang berhubungan dengan akhirat (Anto, 2011). Tenaga kerja termasuk pekerja mandiri dan anggota lain yang tidak dibayar dalam bentuk upah, atau anggota yang benar-benar mau dan mampu bekerja dalam arti terpaksa bekerja karena kurangnya kesempatan kerja (Sumarsono, 2003).

Pengertian angkatan kerja didasarkan pada ketetapan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Pasal 3 terkait Ketenagakerjaan, yang berbunyi, “pekerja/karyawan adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”. persepsi tenaga kerja dalam ekonomi Islam mencakup semua usaha yang dijalankan semua anggota fisik dan mental guna memperoleh imbalan yang sesuai. Mencakup seluruh jenis pekerjaan fisik atau mental. Islam sendiri mendorong mereka untuk bekerja, berproduksi dan membebaskan kewajiban kepada mereka yang mampu melakukannya. Di luar itu, Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas pekerjaan ataupun kegiatan amal yang dikerjakan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat (97), yang berbunyi

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۦ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Al-Qur'an sangat fokus pada sebuah pekerjaan dan dengan jelas menyatakan bila manusia diciptakan di planet ini untuk bekerja keras mengumpulkan nafkah bagi seluruh manusia. Bentuk pekerjaan yang didefinisikan dalam Islam ialah suatu pekerjaan yang dijalankan dengan keterampilan sendiri serta bisa memberikan berbagai manfaat diantaranya yakni:

- a. Menghidupkan tanah mati (tanah yang tidak mempunyai pemilik serta tidak dimanfaatkan seorang pun)
- b. Berburu

- c. Menggali kandungan bumi
- d. Perseroan antara harta dengan tenaga (*mudhorobah*)
- e. Makelar (*samsarah*)
- f. Kontrak tenaga kerja (*ijarah*)
- g. Mengairi lahan pertanian (*musaqat*) (dkk. Huda, 2015)

Dalam Islam, juga terdapat prinsip tenaga kerja. Keempat prinsip ketenagakerjaan dalam Islam yang dimaksud yaitu:

- c. Kemerdekaan manusia

Ajaran Islam dihadirkan bersama dengan sabda Nabi Muhammad SAW secara tegas menyatakan penentangannya terhadap adanya perbudakan guna membangun masyarakat yang adil dan toleran. Agama Islam tidak memberikan toleransi pada perbudakan dengan alasan apa pun. Selain itu, ada praktik jual beli pekerja dan mengabaikan hak mereka untuk tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

- d. Prinsip kemuliaan derajat manusia

Islam memposisikan semua manusia pada posisi yang mulia dan prestisius, apapun profesinya. Islam mencintai Islam yang bekerja keras mencari nafkah. Allah ditegaskan oleh QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

Kemuliaan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya. Salah satu hadis yang populer untuk menegaskan hal ini adalah

خير الناس أنفعهم للناس

Artinya “Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” [HR. Muslim, no. 2699]

e. Prinsip keadilan

Keadilan sangat penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak yang sesuai dengan aktivitasnya.

Yang berdasarkan pada QS. Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Keadilan juga berarti menjaga mata pencaharian di sini. Keadilan yang harus didukung adalah terwujudnya kehidupan yang berdasarkan keseimbangan, dimana yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin, sedangkan yang lemah juga jalan yang baik, bukan dengan melemahkan yang kuat. jadi orang miskin tidak boleh menyakiti orang kaya. Selain itu, keadilan kerja juga menghambat produksi, distribusi, dan eksploitasinya.

f. Prinsip kejelasan akad (perjanjian) dan transaksi upah

Masalah kontrak menjadi perkara yang sangat diperhatikan oleh ajaran Islam karena merupakan suatu bagian paling penting dari sektor ekonomi. Semua orang beriman harus melaksanakan isi yang sudah disepakati, seperti tenaga kerja, upah dan jam kerja. Kontrak harus dibuat untuk tujuan mengatur secara substansial hubungan antara karyawan dan supervisor. Hal tersebut termasuk etika, kewajiban serta hak antara para pihak. Tidak hanya itu, Perjanjian menekankan nilai administratif dan mendukung nilai-nilai moral yang terkait dengan halal. Untuk itu

transparansi dalam kegiatan perdagangan sangat penting untuk menghindari sikap spekulatif, korupsi kolusi, penipuan, dll pada bermacam kegiatan perekonomian, yang pada kenyataannya penipuan pasti merugikan orang tertentu (Rahman, 1996).

D. Pertumbuhan Ekonomi

1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan faktor penting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menerangkan prestasi perkembangan ekonomi suatu negara/ daerah dari periode ke periode berikutnya. Menurut (Sukirno, 2013), dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara seperti penambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai meningkatnya kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Proses peningkatan output perkapita disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai perluasan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat (Azwar, 2016).

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai alur dari perubahan kondisi ekonomi dari negara yang berkesinambungan menuju pada era kondisi lebih maju dan baik pada tingkat periode tertentu. terdapat 3 komponen dasarnya yakni; (1) Meningkatnya persediaan barang secara terus menerus; (2) faktor utama yang menentukan derajat pertumbuhan dalam menyediakan aneka ragam barang kepada penduduknya teknologi maju; (3) inovasi hasil karya IPTEK umat manusia dimanfaatkan dengan tepat jika pemakaian teknologi yang luas serta efisiensi menyesuaikan di bidang kelembagaan dan ideologinya (Hasyim, 2017).

Teori pertumbuhan neo klasik menjelaskan bahwa pertumbuhan total output berhubungan dengan pertumbuhan dalam input, seperti tenaga kerja, modal dan perbaikan dalam teknologi (Dornbusch.R & S. Startz, 2004). Hal inilah yang diduga menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara berbeda-beda.

Sedangkan menurut (Todaro, 2011), Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi yang cepat menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi. Namun masalah fundamental bukan hanya menumbuhkan PDB, tetapi siapakah yang akan menumbuhkan PDB tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu negara ataukah hanya segelintir orang saja. Jika hanya segelintir orang yang menumbuhkan PDB ataukah orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan PDB itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Untuk itu hal yang paling penting dalam pertumbuhan adalah siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut.

Apa yang dikemukakan oleh Todaro sebelumnya dijelaskan oleh teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dalam (Mankiw, 2003). Dalam teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan output nasional merupakan fungsi dari faktor produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka seharusnya aliran pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan. Tingginya pertumbuhan output suatu negara diakibatkan oleh tingginya produktivitas input dalam penciptaan barang dan jasa. Peningkatan output tersebut dapat memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan upah dan pada akhirnya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*) (Afrizal, 2013). Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-daerah, benar-benar dengan potensi dan prioritas daerah. Untuk keseluruhan pembangunan, daerah juga benar-benar merupakan satu

kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan di dalam mewujudkan tujuan nasional.

2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tertentu dapat dilihat melalui indikator yang dapat dijadikan tolak ukur. Menurut (Adisasmita, 2014, p. 91), tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:

a. Ketidakseimbangan Pendapatan

Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.

b. Perubahan Struktur Perekonomian

Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus diorientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja

Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di

Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 juta, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis finansial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).

d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan

Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya).

e. Produk Domestik Regional Bruto

Ukuran umum yang digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah persentase laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala provinsi atau Kabupaten/Kota (Suripto & Subayil, 2020).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sendiri menurut Badan Pusat Statistik yaitu total dari nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan total dari semua nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi di suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya, digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi yang ada. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar acuan yang ada, digunakan untuk melihat pola pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dari sudut pandang perekonomian. Perbaikan indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap permasalahan kemiskinan. Di mana, pertumbuhan ekonomi ini dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa adanya keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Beberapa faktor lama dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi antara lain (Sukirno, 2013):

a. Tanah dan kekayaan alam lainnya.

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan laut yang dapat diperoleh, dan jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang ada. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa permulaan proses pertumbuhan ekonomi. Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan (kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli, dan kekurangan pengetahuan) akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat.

b. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi.

Apabila di dalam perekonomian berlaku keadaan di mana penambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi yang tingkatnya adalah lebih cepat dari tingkat pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita akan menurun. Dengan demikian penduduk yang berlebih-lebihan akan menimbulkan kemerosotan ke atas kemakmuran rakyat.

c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya, dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi itu.

Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan dicapai adalah jauh lebih rendah dari pada yang dicapai masa kini. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah. Oleh karena itu perkembangan per kapita hanya mengalami perkembangan yang kecil sekali.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat memegang peranan yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila di dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah haruslah berusaha untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut.

e. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

Pandangan Adam Smith, menunjukkan bahwa sejak lama orang menyadari tentang pentingnya peranan luas pasar dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila luas pasar terbatas tidak terdapat dorongan kepada para

pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya sangat tinggi. Para pengusaha lebih suka menggunakan cara memproduksi yang teknologinya rendah. Karena produktivitas yang rendah maka pendapatan para pekerja tetap rendah, dan selanjutnya membatasi luas pasar

4. Penghitungan Pertumbuhan Ekonomi

Penghitungan atau pengukuran tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menghitung peningkatan nilai PDRB pada tahun tertentu ke tahun berikutnya. Untuk menghindari kenaikan harga dalam penghitungan, maka data yang digunakan sebaiknya adalah PDRB dengan harga konstan dan bukan dengan harga berlaku.

Menurut Tarigan, Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu, yang dimaksud nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*) nilai tambah komponen bruto mencakup-mencakup komponen faktor pendapatan (upah, gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung neto.

Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sedangkan cara penyajian PDRB dilakukan sebagai berikut:

- a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB.
- b. PDRB Atas Dasar Harga Konstan, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi rill bukan karena kenaikan harga atau inflasi.

Melihat uraian PDRB diatas dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB merupakan nilai secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat/warga dalam suatu wilayah dalam waktu tertentu (1 tahun). PDRB juga merupakan sebagai ukuran laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Dalam penelitian ini untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi digunakan produk domestik regional bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 kabupaten/ Kota di Sumatera Utara

Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dalam bentuk perkiraan laju pertumbuhan ekonomi tahunan atau untuk periode tertentu. laju pertumbuhan ekonomi tahunan tersebut dapat dihitung menggunakan formula sederhana, yaitu:

$$\text{laju pertumbuhan} = \frac{(PDRB_{HK,t} - PDRB_{HK,t-1})}{PDRB_{HK,t}} \times 100\%$$

Keterangan:

$PDRB_{HK,t}$: Nilai PDRB dengan harga konstan pada tahun t

$PDRB_{HK,t-1}$: Nilai PDRB pada tahun sebelumnya (Sjafrizal, 2014)

5. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia (Sadeq, 1991), Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

Banyak ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi

merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia. Dengan kata lain, pendekatan ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, akan tetapi mencakup aspek hukum, sosial, politik dan budaya. Dalam pengertian ini, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memajukan dasar-dasar keadilan sosial, kesamaan, Haka Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia (Alvi & Al-Raubae, 2005).

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia (N. Huda, 2018). Pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam QS. Nuh 10-12:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya: “10. Lalu, aku berkata (kepada mereka), “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. 11. (Jika kamu memohon ampun,) niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, 12. memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu.”

Dari uraian tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan istighfar (minta ampun). Allah menjanjikan rezeki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan

dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada tuhan, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menelusuri kajian - kajian atau penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini berikut beberapa penelitian terdahulu sebagai penguat dan pembeda dengan penelitian peneliti, seperti dibawah ini

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh <i>Islamic Human Development Index</i> dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dengan pengangguran sebagai variabel intervening	(Aiu Viollani et al., 2022)	Hasil uji langsung menunjukkan bahwa I-HDI dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran, sedangkan hasil uji tidak langsung menunjukkan bahwa I-HDI dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.
2.	<i>Islamic Human Development Index (iHDI) and Poverty Reduction in OIC Countries</i>	(Isa et al., 2023)	hasil studi IHDI menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. IHDI menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang berlandaskan pada Maqasid Syariah dapat membantu

			mengurangi kemiskinan secara menyeluruh.
3.	<i>Economic growth, unemployment and poverty: Linear and non-linear evidence from South Africa</i>	Mbongeni Zwelakhe Ngubane, Siyabonga Mndebele, Irshaad Kaseeram Heliyon, (Ngubane dkk., 2023)	Pengangguran berpengaruh menaikkan kemiskinan dalam jangka panjang, sementara pertumbuhan ekonomi berpengaruh mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Berdasarkan temuan temuan di atas, plot asimetris mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan.
4.	<i>Determinants of Poverty In Indonesia</i>	(Ramadhona et al., 2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. variabel pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan

5.	<i>Analysis of the Islamic Human Development Index (I-HDI), Economic Growth and Unemployment Rate on Poverty in Indonesia for the 2013-2022 period</i>	(Vinta & Rosyidah, 2022)	Temuan studi ini mengungkapkan variabel I-HDI berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, dan variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif. Sebaliknya, variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
6.	Analisis Pengaruh Ipm, Pdrb Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode Tahun 2017 – 2021	(Azriyansyah, 2022)	Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya apabila Indeks Pembangunan Manusia meningkat maka akan diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia
7.	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Dengan Distribusi Zakat Sebagai Variabel Moderasi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019	(Maulana, 2020)	zakat mampu memoderasi indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

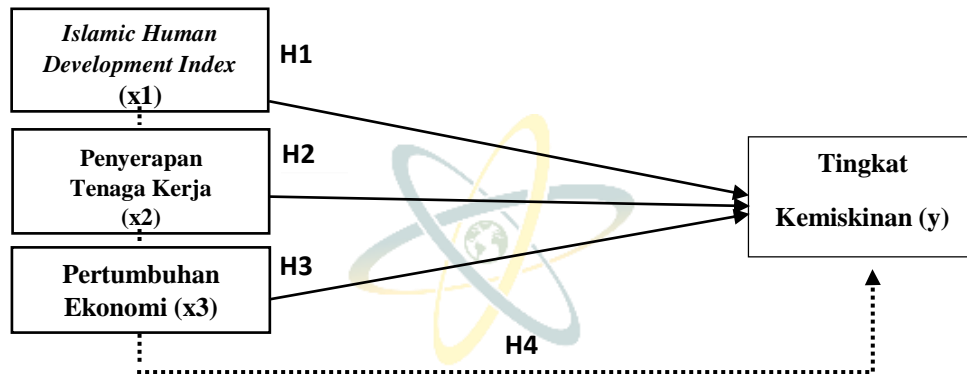
8.	Pengaruh Zakat dan Islamic Human Development Index terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017–2020	(Asep Nurhalim et al., 2022)	Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan estimasi <i>random effect model</i> . Hasil regresi menunjukkan IHDI memiliki pengaruh yang negatif, namun tidak signifikan.
9.	Pengaruh Investasi, Pdrb Dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk Miskin	(Purnomo & Kusreni, 2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB secara langsung berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, dan penyerapan tenaga kerja secara langsung berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin.
10.	<i>The Effect of Unemployment, Economic Growth on Poverty with Zakat as a Moderation Variable</i>	(Ridlo & Sari, 2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di enam provinsi di pulau Jawa

Sumber: Dari berbagai Sumber

Berlandaskan hasil temuan sebelumnya yang tertera pada tabel 2.2, penulis masih menemukan *gap*, di antaranya : dari penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil. Adanya penelitian ini dilakukan guna membuktikan apabila masih terdapat hasil yang jauh lebih baik guna menekan *gap* yang ada menggunakan variasi model variabel lain. Objek dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023.

F. Kerangka Pemikiran

Guna memudahkan pemahaman terkait permasalahan dalam penelitian ini supaya dikembangkan dan diuji kebenarannya, maka diperlukan adanya kerangka pemikiran pada penelitian ini, digambarkan di bawah ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul (Sugiyono, 2017). Sehingga hipotesis (H_0 dan H_1) dalam penelitian ini berupa:

- a) H_{a1} : IHDI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
 H_{01} : IHDI tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
- b) H_{a2} : Penyerapan tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
 H_{02} : Penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
- c) H_{a3} : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan
 H_{03} : Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan

d) Ha4 : *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan

H04 : *Islamic Human Development Index (I-HDI)*, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN